

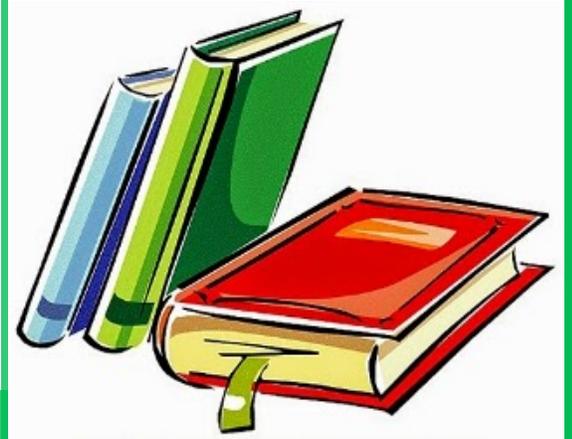
Untuk Kalangan Sendiri



**STPP Medan
Kementan
2015**

MODUL PRAKTIK KERJA LAPANG (PKL) I

Disusun Oleh:
TIM PENYUSUN MODUL PKL I



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga modul Praktik Kerja Lapangan (PKL) I TA 2014/2015 ini dapat disusun. Modul ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan PKL I bagi dosen, mahasiswa, penyuluh pertanian lapangan yang menjadi pembimbing eksternal mahasiswa.

PKL I merupakan kegiatan kurikuler yang wajib dilaksanakan mahasiswa STPP Medan semester II Jurusan Penyuluhan Pertanian dan Jurusan Penyuluhan Perkebunan. PKL I ini memiliki beban sks 0-4 (teori-praktek). Setelah mengikuti PKL I, diharapkan mahasiswa mampu menyiapkan dan melaksanakan penyuluhan pertanian untuk level Penyuluh Pertanian Pelaksana Lanjutan.

Tak lupa kami ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah ikut membantu dalam penyelesaian modul ini.

Akhir kata, kritik dan saran membangun dari semua pihak sangat penulis harapkan. Semoga modul ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Amin.

Medan, April 2015

Panitia PKL I TA 2014/2015

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
I. UNIT 1 Identifikasi Potensi Wilayah dan Agroekosistem	1
II. UNIT 2 Rencana Definitif Kelompok dan Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok	11
III. UNIT 3 Programa Penyuluhan Pertanian	18
IV. UNIT 4 Rencana Kerja Tahunan Penyuluh	31

UNIT 1

IDENTIFIKASI POTENSI WILAYAH DAN AGROEKOSISTEM

Disusun Oleh:

A. Pendahuluan

Potensi secara bahasa, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dikembangkan; kekuatan; kesanggupan; daya dan wilayah dalam hal ini bermakna lingkungan daerah (propinsi, kabupaten, kecamatan). Untuk keperluan ini bisa dipilih wilayah tertentu, misalnya meliputi potensi wilayah desa. Jadi “potensi desa mengandung arti kemampuan yang dimiliki desa yang memungkinkan untuk dikembangkan. Kemampuan yang dimiliki suatu lingkungan tertentu misalnya desa baik sumber daya alam atau sumber daya manusia yang mungkin untuk dikembangkan tetap selamanya menjadi “potensi” bila tidak diolah, atau didayagunakan menjadi suatu “realita” berwujud kemanfaatan kepada masyarakat. Karena itu potensi wilayah memerlukan upaya-upaya tertentu untuk membuatnya bermanfaat kepada masyarakat di wilayah tersebut. Misalnya sungai merupakan potensi menjadi irigasi, rawa rawa potensi menjadi kolam ikan, sarjana sarjana yang ada di desa potensi yang dapat dimanfaatkan pengetahuannya untuk mengembangkan desa tersebut dan lain lain.

Seorang penyuluh baru dapat menyusun program penyuluhan ditingkat desa harus mengetahui keadaan di desa tersebut baik sumber daya alam dan sumber daya manusia. Dengan mengetahui keadaan penyuluh dapat membuat tujuan apa yang ingin dicapai dalam mencapai tujuan tersebut ada masalah atau tidak, apa masalahnya, dimana masalahnya, bagaimana cara pemecahannya, kapan pemecahannya, siapa yang melaksanakan dan berapa budgetnya. Semua ini dituangkan dalam program penyuluhan ditingkat desa yang merupakan perencanaan yang akan dikerjakan selama satu tahun. Kemudian apa yang sudah tertulis di dalam program ditingkat desa disampaikan kepala balai penyuluhan pertanian untuk diramukan dimasukkan kedalam program balai penyuluhan pertanian ditingkat kecamatan.

Penyuluh yang bergerak di sektor pertanian harus mampu menggali potensi agroekosistem wilayah pertanian tertentu dan menjadi suatu “kenyataan” memberi manfaat kepada pembangunan pertanian khususnya di bidang agribisnis. Bermanfaat dapat berarti meningkatkan produktivitas, pendapatan, nilai tambah atau secara umum dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang bergerak dan terkait dengan sektor pertanian.

Penyuluh harus mengasah kemampuannya agar mampu melihat dan menggali potensi agroekosistem wilayah dimana ia bekerja untuk bersama-sama dengan masyarakat pelaku utama dan pelaku usaha mengubahnya menjadi pertanian yang lebih bermanfaat. Untuk mencapai hasil yang baik, seorang penyuluh perlu mempersiapkan suatu “instrumen”

untuk menggali potensi wilayah agroekosistem sehingga fenomena agroekosistem menjadi mudah dipahami dan akan memudahkan dalam penyusunan rencana pembangunan dan pengembangan usahatani tertentu. Penyuluh harus dapat melihat peluang usaha di agroinput (usaha pembibitan tanaman, ternak, ikan, usaha menjual sarana produksi dan lain lain). Peluang usaha di agronomi (budi daya tanaman, ternak, ikan dan lain lain). Peluang usaha di agroindustri (usaha pengolahan hasil tanaman, ternak. Ikan) pengolahan produk primer menjadi produk skunder, tertier dan seterusnya. Peluang usaha di agroniaga (menjadi pedagang pengumpul tingkat desa, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten atau tingkat provinsi dan lain lain). Peluang usaha di agropendukung (usaha lembaga keuangan mikro, koperasi dan lain lain)

Identifikasi Potensi wilayah dilakukan untuk memperoleh data keadaan wilayah Agroekosistem meliputi keadaan wilayah fisik keadaan sosial keadaan ekonomi dan Potensi pendukung dari data primer maupun data sekunder. Sumber data sekunder diperoleh dari Monografi desa/ kecamatan/BPP dan atau dari sumber-sumber lain yang relevan sedangkan data primer diperoleh dari lapangan melalui petani atau masyarakat. Identifikasi potensi wilayah dilakukan dengan cara :

1. Identifikasi menggunakan data sekunder dengan cara mengumpulkan seluruh data agroekosistem , data monografi desa/kecamatan/BPP dan lain-lain
2. Identifikasi menggunakan data primer dengan wawancara terstruktur atau semi terstruktur menggunakan teknik RRA dan PRA dan teknik lainnya

Hasil identifikasi disusun dalam laporan yang menggambarkan keadaan , prioritas masalah dan faktor penyebab masalah, faktor penentu, kebutuhan penyelesaian masalah dalam bentuk Rencana Definitif Kelompok/ RDK (Kebutuhan teknologi dan lain-lain) dan Rencana Definitif Kegiatan Kelompok / RDKK (kebutuhan pelayanan / fasilitasi kelompok).

B. Pengumpulan dan Pengolahan Data Sekunder

Pengumpulan dan pengolahan data sekunder adalah proses untuk mempelajari keadaan desa / wilayah berdasarkan data informasi yang telah ada dalam bentuk dokumen tertulis yang dibuat oleh pihak tertentu (Dinas Pertanian, Badan Pelaksana penyuluhan pertanian, BPP, kantor statistik, kepala desa, pengurus seksi LKMD/BPD, KTNA kecamatan/desa, catatan kelompok tani, catatan penyuluh, dll).

Data sekunder diperlukan sebagai dasar dalam memahami kondisi wilayah dan masyarakatnya, data sekunder diperoleh dari hasil pengumpulan data oleh pihak lain. Identifikasi potensi wilayah dan agroekosistem dengan menggunakan data Sekunder mencakup, a) Peta Desa, b) Karakteristik lahan (desa), c) Curah hujan (mm) dan hari hujan

(jumlah hari hujan) rata-rata 10 tahun terakhir, d) Luas Potensial dan fungsional (yang digunakan) e) Penggunaan lahan berdasarkan ekosistem, f) Pola usahatani dalam satu tahun, g) Jumlah penduduk berdasarkan umur dan tingkat pendidikan, h) Jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan, i) Karakteristik Petani berdasarkan kelas kelompoknya dan status fungsionalnya, j) Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin dan status pengelolaan lahan, k) Data koperasi, kredit pertanian, tunggakan dan tabungan kelompok. Data sekunder yang akan diambil di lokasi PKL disesuaikan dengan data yang ada di wilayah tersebut, seperti ;

1. Peta Sumber Daya Desa

Peta desa dapat diperoleh di kantor desa atau kantor Balai Penyuluhan Pertanian (BPP/BP3K). Berguna untuk mengetahui batas batas wilayah desa dengan desa lain, luas wilayah, keadaan wilayah desa, jarak dari kota kecamatan, kabupaten atau provinsi.

2. Sumber Daya Manusia (Penduduk)

a. Jumlah Penduduk Menurut Golongan Umur.

No	Nama Kelompoktani	Jumlah Penduduk yang Berumur (Tahun)							Total
		0-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	>60	

b. Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan

No	Kelompoktani	Jumlah Penduduk				
		Belum Sekolah	SD	SMP	SMU	PT

c. Jumlah Keluarga Tani Berdasarkan Status Pengelolaan Lahan

No	Nama Dusun	Jumlah Penduduk (org)	Jumlah Keluarga (KK) Tani	Jumlah Keluarga Tani (KK)				
				Pemilik Lahan Tidak menggarap	Pemilik Lahan penggarap	Penggarap	Buruh Tani	Total

d. Jumlah Kepala Keluarga berdasarkan Pekerjaan

No	Kelompoktani	Jumlah Kepala Keluarga				
		Petani	Pegawai	Pedagang	Buruh Tani	Buruh Bangunan

2. Sumber Daya Alam (Bio fisik)

a. Tanah

No.	Nama Dusun	Tanah Darat (Ha)			Tanah Sawah irigasi (Ha)				Kolam (Ha)	Tambak (Ha)	Jumlah Tanah Pertanian
		Tegalan	Pekarangan	Jumlah	Tehnis	½ Tehnis	Tersier	Tadah Hujan			

b. Iklim/ Curah Hujan

No	Tahun Bulan	2010		2011		2012		2013	
		Jumlah mm ³	Jumlah Harinya						
1	Januari								
2	Februari								
3	Maret								
4	April								
5	Mei								
6	Juni								
7	Juli								
8	Agustus								
9	September								
10	Oktober								
11	November								
12	Desember								

c. Potensi Agroekosistem

Nama Desa :

Tahun :

No.	Jenis Usahatani (Pada Lahan)	Jumlah Luas Tanam (Ha)	Jumlah KK Petani	Rata-Rata Luas Per Orang (Ha/Org)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Ton/Ha)
1	Lahan Sawah irigasi					
	a					
	b					
	dst					
2	Lahan sawah tadah hujan					
	a					
	b					
	dst					
3	Lahan sawah pasang surut					
	a					
	b					
	dst					
	Lahan Kering					
4	a					
	b					
	dst					
	Perairan umum:					
5	Perairan pantai					
	a					
	b					
	Danau					
	a					

b					
Sungai					
a					
b					
Perkebunan					
6 a. kelapa sawit					
b. Karet					
c. Kakao					
d. Kelapa					
e.					
Usaha off farm					
7. a.					
b.					
c.					
dst					

3. Penunjang (kelembagaan)

a. Kelembagaan Petani

1) Jumlah Kelembagaan

No	Nama Desa	Jumlah Kelompok Tani	Jumlah Kelompok Tani						
			Tani Dewasa		Tani Wanita		Taruna Tani		
			Jumlah Kel.	Jumlah Anggota	Jumlah Kel.	Jumlah Anggota	Jumlah Kel.	Jumlah Anggota	

2)

3)

4)

5)

2 Nama Kelompok Tani dan kedudukan

No	Nama Desa	Nama Klpk	Nama Pengurus				Jumlah Anggota	Modal Klpk	Jenis Usahatani Pokok (Utama)	Luasan		
			Ketua	Wakil	Sekretaris	Bendahara				Ha	Ekor	Petak

3) Nama Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dan Kedudukan

No	Nama Desa	Nama Gapoktan	Nama Pengurus				Jlh Anggota	Modal Gapoktan	Jenis Usahatani Pokok (Utama)	Luasan		
			Ketua	Wakil	Sekretaris	Bendahara				Ha	Ekor	petak

b. Kelembagaan Ekonomi Pedesaan

No	Nama Desa	Jumlah BUUD/KUD		Koperasi Pertanian diluar KUD		Bank Unit Desa (BPR,BRI)	Kios Saprotan	Lembaga Swadaya Desa (LSD)	Lumbung Padi/ Desa
		Buah	Anggota	Buah	Anggota				

		Tanaman Pangan Hortikultura	Perkebunan	Tanaman (Ha)	Panen (Ha)	Tiap Ha (Kw)	Produksi Waktu Panen per Kw (Rp)	Rata-rata Tiap Ha (Rp)	Pelaksana

2) Ternak

No	Nama Desa	Jenis Ternak									Ket
		(Ekor)	Sapi (Ekor)	(Ekor)	(Ekor)	Domba (Ekor)	Ayam (Ekor)	Bebek (Ekor)	Itik (Ekor)	Lain-Lain	

3) Perkebunan Rakyat

No	Nama Desa	Tanaman				Tanaman.....				Tanaman			
		Luas		Produksi		Luas		Produksi		Luas		Produksi	
		Ha	Pohon	Jumlah	Satuan	Ha	Pohon	Jumlah	Satuan	Ha	Pohon	Jumlah	Satuan

4) Hortikultura

No	Nama Desa	Tanaman				Tanaman.....				Tanaman			
		Luas		Produksi		Luas		Produksi		Luas		Produksi	
		Ha	Pohon	Jlh	Satuan	Ha	Pohon	Jlh	Satuan	Ha	Pohon	Jlh	Satuan

5) Pemasaran

No	Nama Desa	Nama Kelompok	Lokasi Pemasaran Produk	Jenis Produksi Yang Dipasarkan

6) Kemitraan

No	Nama Desa	Nama Kelompok	Mitra	Jenis/bentuk Kemitraan	Tahun kemitraan

Matrik 1. Identifikasi Masalah dan Upaya Pemecahannya

Nama Desa :

Tahun :

No.	Potensi	Tujuan Pengembangan	Masalah	Tindakan/Kegiatan Pemecahan Masalah
1				
2				
3				
Dst				

C. RANGKUMAN

Identifikasi Keadaan Wilayah merupakan suatu proses penggalian data dan analisis informasi (masalah, potensi, dll), keadaan wilayah pertanian baik berupa data sekunder maupun data primer, yang dilakukan secara perorangan atau bersama oleh sebuah tim dengan menggunakan secara partisipatif. Sumber data sekunder antara lain dapat diperoleh dari kantor Desa/kantor statistik, BPP, dan atau sumber-sumber lain yang relevan dan data primer yang diperoleh dari lapangan, petani dan masyarakat, instansi, lembaga pemerintah dan swasta .

Potensi wilayah adalah kemampuan yang dimiliki suatu wilayah (desa, kecamatan, dsb) yang memungkinkan untuk dikembangkan atau dengan kata lain semua sumberdaya yang ada dan dapat digunakan dalam upaya mengatasi masalah untuk mencapai tujuan.

Tujuan dari kegiatan ini tersedianya gambaran keadaan wilayah pertanian secara menyeluruh dari suatu wilayah desa/kecamatan/kabupaten dsb, dimana hasil Identifikasi tersebut merupakan bahan penyusunan program penyuluhan pertanian tingkat desa. Kegiatan identifikasi wilayah akan menghasilkan kompilasi data agroekosistem yang meliputi data teknis, sosial dan ekonomi, berguna untuk melakukan analisis kelayakan teknis, sosial, dan ekonomi, sehingga dapat ditentukan usaha agribisnis yang dapat dikembangkan.

D. Penugasan :

1. Mahasiswa mempelajari laporan/data identifikasi potensi wilayah di desa tersebut
2. Data tersebut diperoleh dari penyuluh setempat, BPP, kantor kepala Desa, Ketua koptan atau pihak lain yang berkompeten
3. Seluruh data yang diperoleh diisi pada matriks yang sudah disiapkan
4. Buat laporan PKL I sesuai outline yang sudah ditentukan

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Identifikasi Keadaan Wilayah adalah suatu proses penggalian dan analisis informasi (masalah, potensi, dll) baik berupa data sekunder maupun data primer, yang dilakukan secara perorangan atau bersama oleh sebuah tim dengan menggunakan prinsip dan metode partisipatif. Sumber data sekunder antara lain diperoleh dari Monografi Desa dan atau sumber-sumber lain yang relevan dan data primer yang diperoleh dari lapangan, petani dan masyarakat, instansi, lembaga pemerintah dan swasta.

2. Tindak Lanjut

Setelah melakukan penugasan yang ada di dalam modul, mahasiswa akan menemui kendala-kendala berupa data yang tidak tersedia dilokasi praktek lapang. Oleh sebab itu mahasiswa harus selalu berusaha belajar mengumpulkan data sekunder dari berbagai pihak yang dapat mendukung informasi data yang dibutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adimihardja. K. dan Harry Hikmat, 2004. *Participatory Research Appraisal dalam Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat*. Jakarta: Humaniora.
- Anonim, 2009. *Identifikasi Potensi Wilayah*. Jakarta: Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian. Departemen Pertanian.
- _____, 2009. *Teknik Analisis Wilayah Berorientasi Agribisnis*. Jakarta: Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian. Departemen Pertanian.
- Hikmat H., 2010. *Stratgi Pembardayaan Masyarakat*. Jakarta: Humaniora.
- Rangkuti F., 2008. *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Suhartini Rr., dkk., 2005. *Model-model Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Lkis Pelangi Aksara.
- Yusri M Yusuf, 2014 *Dasar Dasar Agribisnis*. Medan: Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian

UNIT 2

RENCANA DEFINITIF KELOMPOK & RENCANA DEFENITIF KEBUTUHAN KELOMPOK

Disusun Oleh:

Ir. Karim Tarigan, M.S.

A. Pengertian Rencana Definitif Kelompok dan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok

Rencana Definitif Kelompok (RDK) , merupakan proses perumusan kegiatan yang dilakukan oleh kelompok tani, dimana kegiatan kelompok tani tersebut bertitik tolak dari aspek organisasi, aspek usaha, aspek permodalan, dan aspek kerjasama, serta terarah pada pemecahan masalah yang dihadapi dengan optimalisasi pemanfaatan potensi yang dimiliki. RDK adalah rencana kerja usahatani dari kelompok tani untuk satu tahun, yang disusun melalui musyawarah dan berisi rincian kegiatan dan kesepakatan bersama dalam pengelolaan usahatani.

Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) adalah rencana kebutuhan kelompok tani untuk satu musim tanam yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani, meliputi kebutuhan benih, pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian, serta modal kerja, untuk mendukung pelaksanaan RDK yang dibutuhkan oleh petani yang merupakan pesanan kelompok tani kepada gabungan kelompok tani atau lembaga lain (distributor sarana produksi dan perbankan).

RDKK sebagai dasar rencana pengadaan dan pelayanan dari GAPOKTAN, maka dalam pelaksanaan penyusunan RDKK mengacu kepada RDK masing-masing kelompok tani.

Data potensi suatu wilayah berdasarkan data sekunder untuk mengenal/ mengetahui peluang usaha tani disuatu desa/wilayah telah dikumpulkan, dan dari data tersebut juga telah dikaji masalah dan penyebabnya yang sering terjadi, serta berbagai alternatif penggunaan/pengembangan potensi yang ada pada wilayah tersebut telah ditetapkan pada identifikasi potensi wilayah. Hasil pengolahan data identifikasi potensi wilayah digunakan sebagai dasar untuk merumuskan RDK.

Hasil analisis data yang digunakan untuk menyusun RDK antara lain mengenai:

1. Pengenalan Potensi Lingkungan yang meliputi;
 - Potensi sumberdaya alam (tanaman, tanah, air dll)
 - Potensi sumberdaya manusia
 - Potensi agroekosistem
 - Kelembagaan usaha, pasar, permodalan, jasa dll.
 - Mobilitas keluarga/masyarakat.
 - Infra struktur.
2. Kondisi sosial dan ekonomi anggota kelompok yang meliputi;
 - Pembagian peran, kegiatan, akses dan kontrol anggota keluarga.
 - Perkiraan pendapatan keluarga.
 - Jenis usaha/sumber pendapatan yang dilakukan oleh keluarga.
 - Curahan waktu kerja produktif anggota keluarga.
 - Perkiraan pengeluaran keluarga.
3. Potensi sumberdaya untuk mengembangkan usaha yang meliputi;
 - Jenis usaha yang dilakukan sekarang.
 - Jenis usaha yang dilakukan oleh pengusaha/petani lain.
 - Tingkat penerapan teknologi
 - Ketersediaan bahan baku dan sarana
 - Ketersediaan teknologi.
 - Daur/siklus usaha
 - Jalur tataniaga/pemasaran.
 - Sumber permodalan.
4. Modal usahatani dan titik impas serta arus kas yang meliputi;
 - Harga beli bahan, sarana (habis pakai) dll.
 - Biaya produksi/pembuatan produk.
 - Harga jual produk
 - Perkiraan hasil produk
 - Nilai modal tetap.
 - Nilai modal tidak tetap.
 - Jadwal kegiatan produksi
 - Taksiran biaya produksi
 - Pengeluaran pertahapan kegiatan

 - Taksiran produksi persatuan waktu
 - Taksiran penerimaan.

5. Pemasaran hasil usaha yang meliputi;
 - Jenis produksi yang dipasarkan
 - Harga produk
 - Cara pemasaran
 - Lokasi/tempat pemasaran.

Informasi dari analisis data tersebut diatas, digunakan untuk menetapkan alternatif komoditi dan kegiatan usahatani yang berpotensi untuk dikembangkan oleh kelompok tani.

B. Materi Rencana Definitif Kelompok

Materi RDK meliputi;

1. Pola tanam dan pola usahatani yang disusun atas dasar pertimbangan;
 - a. Aspek teknis (agroekosistem dan teknologi)
 - b. Aspek ekonomi (permintaan pasar, harga, keuntungan usahatani, dll).
 - c. Aspek sosial (kebijakan pemerintah, kerja sama kelompok tani, dan dukungan masyarakat dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.
2. Sasaran areal tanam dan produksi didasarkan atas;
 - a. Potensi wilayah kelompok tani.
 - b. Produktifitas dari masing-masing komoditi.
 - c. Kebutuhan konsumsi anggota kelompok dan permintaan pasar.
3. Teknologi usahatani;
 - a. Ketersediaan teknologi
 - b. Rekomendasi teknologi
4. Sarana produksi dan permodalan, didasarkan atas;
 - a. Luas areal usahatani kelompok tani
 - b. Teknologi yang akan diterapkan
 - c. Kemampuan permodalan anggota kelompok tani.
5. Jadwal kegiatan, mengacu kepada rencana kegiatan usahatani.

6. Pembagian tugas disesuaikan dengan ketersediaan dan kesepakatan kelompok.

Menetapkan alternatif komoditi dalam RDK suatu kelompok dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Tentukan alternatif komoditi yang berpotensi berdasarkan aspek Fisik dan Teknis;
 - a. Kemampuan tanah
 - b. Agroklimat
 - c. Teknologi yang tersedia
 - d. Transportasi
 - e. dsb
2. Tentukan alternatif komoditi yang berpotensi berdasarkan aspek sosial/budaya;
 - a. Luas penggunaan sumberdaya
 - b. Pola usahatani yang dilaksanakan
 - c. Keadaan tenaga kerja
 - d. Kelembagaan petani
 - e. Dsb
3. Tentukan alternatif komoditi yang berpotensi berdasarkan aspek ekonomi/bisnis;
 - a. Pasar
 - b. Ketersediaan modal
 - c. Sarana produksi
 - d. Dsb
4. Potensi budidaya berdasarkan kebijaksanaan
 - a. Pemerintah
 - b. Swasta
 - c. Dsb.

Komoditas yang berpotensi ditentukan oleh nama-nama komoditas yang paling sering muncul pada aspek-aspek tersebut, merupakan komoditi usahatani yang diprioritaskan.

C. Materi Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok

Materi RDKK terdiri dari:

1. Jenis dan luas masing-masing komoditi yang diusahakan.
2. Perhitungan kebutuhan.
 - a. benih (bahan perbanyak tanaman)
 - b. pupuk
 - c. pestisida
 - d. biaya garap dan pemeliharaan
 - e. biaya panen dan pasca panen.
3. Jadwal penggunaan sarana produksi (sesuai kebutuhan lapangan).

Masing-masing kebutuhan tersebut ditentukan jumlah maupun nilai uangnya dan diperinci yang akan dibiayai secara swadana dan kredit.

D. Penugasan

Tugas mahasiswa dalam kegiatan RDK adalah;

1. Minta format RDK yang telah disusun oleh kelompok tani.
2. Lakukan wawancara tentang cara penyusunan RDK.
3. Lakukan evaluasi tentang kebenaran penyusunan RDK yang dibuat oleh kelompok tani.
4. Tetapkan peluang komoditi yang akan dibudidayakan oleh kelompok tani, yang dilakukan dengan menentukan skala prioritas berdasarkan hasil analisis data potensi wilayah (Form 1. RDK).

Tugas mahasiswa dalam kegiatan RDKK adalah;

1. Minta format RDKK yang telah disusun oleh kelompok tani.
2. Lakukan wawancara tentang cara penyusunan RDKK.
3. Lakukan evaluasi kebenaran penyusunan RDKK yang dilakukan oleh kelompok tani
4. Susunlah RDKK untuk budidaya komoditi yang telah ditetapkan pada RDK diatas, dengan mengisi blanko Rekapitulasi RDKK (Form 2. RDKK).

Form 2. RDKK

**RENCANA DEFINITIF KEBUTUHAN KELOMPOK (RDKK)
YANG MEMERLUKAN KREDIT**

Kelompoktani :

Musim tanam :

Gapoktan :

Jenis komoditi:

Desa :

Jadual tanam :

Kecamatan :

Tanggal musyawarah :

Jadwal kebutuhan kredit :

No	Nama Petani	Luas Garapan (Ha)	Sarana Produksi Pertanian												Garapan/ pemeliharaan Rp	Panen & Pasca panen Rp	Jumlah Kredit Rp	Tanda Tangan	
			Urea		TSP		KCI		NPK		Benih		Pestisida						
			Kg	Rp	Kg	Rp	Kg	Rp	Kg	Rp	Kg	Rp	Kg/L	Rp					
Jumlah																			

....., 201...

Ketua Kelompoktani

(.....)

UNIT 3

PROGRAMA PENYULUHAN PERTANIAN

Disusun Oleh :

Mukhlis Yahya, S.P., M.P.

A. Latar Belakang

Programa penyuluhan pertanian yaitu rencana tertulis yang disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyuluhan pertanian.

Programa penyuluhan terdiri atas programa penyuluhan desa/kelurahan, atau unit kerja lapangan, programa penyuluhan kecamatan, programa penyuluhan kabupaten/kota, programa penyuluhan propinsi, dan programa penyuluhan nasional. Programa penyuluhan pertanian terdiri dari empat unsur yang saling berkaitan dan tersusun menurut urutan yang tidak boleh diubah. Ke empat unsur tersebut adalah keadaan, tujuan, permasalahan dan rencana kegiatan (Anonim, 2009).

Keadaan yang menggambarkan fakta-fakta berupa data dan informasi mengenai potensi, produktivitas dan lingkungan usaha pertanian, perilaku/tingkat kemampuan petani dan kebutuhan pelaku utama dalam usahanya di wilayah (desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional) pada saat akan disusunnya programa penyuluhan pertanian,

Tujuan yaitu pernyataan penyelesaian masalah atau pernyataan apa yang ingin dicapai. Tujuan dalam hal ini memuat pernyataan mengenai perubahan perilaku dan kondisi pelaku utama dan pelaku usaha yang hendak dicapai dengan cara menggali dan mengembangkan potensi yang tersedia pada dirinya, keluarga dan lingkungannya untuk memecahkan masalah yang dihadapi dan merespon peluang.

Prinsip yang digunakan dalam merumuskan tujuan yaitu: SMART: *Specific* (khas); *Measurable* (dapat diukur); *Actionary* (dapat dikerjakan/dilakukan); *Realistic* (realistis); dan *Time Frame* (memiliki batasan waktu untuk mencapai tujuan).

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam merumuskan tujuan adalah: ABCD: *Audience* (khalayak sasaran); *Behaviour* (perubahan perilaku yang dikehendaki); *Condition* (kondisi yang akan dicapai); dan *Degree* (derajat kondisi yang akan dicapai).

Permasalahan dalam hal ini terkait dengan faktor-faktor yang dinilai dapat menyebabkan tidak tercapainya tujuan, atau faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya

perbedaan antara kondisi saat ini (*faktual*) dengan kondisi yang ingin dicapai. Faktor-faktor tersebut antara lain:

1. Faktor yang bersifat perilaku, yaitu faktor yang berkaitan dengan tingkat adopsi pelaku utama dan pelaku usaha terhadap penerapan suatu inovasi/teknologi baru, misalnya belum yakin, belum mau, atau belum mampu menerapkan dalam usahanya.
2. Faktor yang bersifat non perilaku, yaitu faktor yang berkaitan dengan ketersediaan dan kondisi sarana dan prasarana pendukung usaha pelaku utama dan pelaku usaha, misalnya ketersediaan pupuk, benih/bibit atau modal.

Rencana kegiatan menggambarkan apa yang dilakukan untuk mencapai tujuan, bagaimana caranya, siapa yang melakukan, siapa sasarannya, dimana, kapan, berapa biayanya, dan apa hasil yang akan dicapai untuk memecahkan masalah yang dihadapi dan merespon peluang yang ada.

Rencana kegiatan harus memuat unsur-unsur : SIADIBIBA : Siapa yang akan melaksanakan?; Apa tujuan yang ingin dicapai?; Dimana dilaksanakan?; Bilamana/kapan waktu pelaksanaan?; berapa banyak hasil yang ingin dicapai (kuantitas dan kualitas)?; berapa korbanan yang diperlukan (biaya, tenaga, dll)?; serta bagaimana melaksanakannya (melalui kegiatan apa)?.

Rencana kegiatan yang disajikan dalam bentuk tabulasi/matriks yang berisi masalah, kegiatan, metode, keluaran, sasaran, volume/frekuensi, lokasi, waktu, biaya, sumber biaya, penanggungjawab, pelaksanaan dan pihak terkait.

Modul ini mengkaji tentang Pengumpulan data sekunder dalam rangka penyusunan Program penyuluhan pertanian Modul ini diharapkan bermanfaat bagi mahasiswa untuk membekali pengetahuan penyusunan program penyuluhan pertanian menggunakan data sekunder.

B. Tujuan Pembelajaran

1. Kompetensi Dasar

Setelah selesai pembelajaran mahasiswa diharapkan mampu mengumpulkan data sekunder dalam menyusun program penyuluhan pertanian.

2. Indikator Keberhasilan

Mahasiswa mampu mengumpulkan data sekunder untuk merumuskan keadaan wilayah dalam penyusunan program penyuluhan pertanian

C. Konsep Dasar Program Penyuluhan

Maksud dan tujuan penyusunan program penyuluhan adalah :

1. Menyediakan acuan dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian bagi para penyelenggara.
2. Memberikan acuan bagi penyuluh pertanian dalam menyusun rencana kegiatan penyuluhan pertanian.
3. Menyediakan bahan penyusunan perencanaan penyuluhan untuk disampaikan dalam forum musrenbangtan tahun berikutnya.

Ruang lingkup Pedoman Penyusunan program penyuluhan pertanian meliputi persiapan, penyusunan, pelaksanaan dan monitoring serta evaluasi program penyuluhan pertanian.

Dalam penyusunan program penyuluhan pertanian perlu dipahami tentang pengertian seperti dibawah ini :

1. Sistem Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disebut sistem penyuluhan adalah seluruh rangkaian pengembangan kemampuan, pengetahuan, keterampilan, sikap pelaku utama dan pelaku usaha melalui penyuluhan.
2. Revitalisasi Penyuluhan Pertanian adalah upaya mendudukkan, memerankan, memfungsikan dan menata kembali penyuluhan pertanian agar terwujud satu kesatuan pengertian, satu keratuan korps dan satu kesatuan arah serta kebijakan.
3. Penyuluhan Pertanian adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasi dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumberdaya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas evisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
4. Program Penyuluhan adalah rencana tertulis yang disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman sebagai alat pengendali pencapaian penyuluhan.
5. Materi Penyuluhan adalah bahan yang akan disampaikan oleh para penyuluh kepada pelaku utama dan pelaku usaha dalam berbagai bentuk yang meliputi informasi, teknologi, rekayasa sosial, manajemen, ekonomi hukum dan kelestarian lingkungan.

6. Rencana Kerja Tahunan Penyuluh adalah jadwal kegiatan yang disusun oleh penyuluh berdasarkan program penyuluhan setempat yang dilengkapi dengan hal-hal yang dianggap perlu untuk berinteraksi dengan pelaku utama dan pelaku usaha.
7. Penyuluh Pertanian, baik penyuluh PNS, swasta maupun swadaya, yang selanjutnya disebut penyuluh adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan.
8. Pelaku Utama Kegiatan Pertanian yang selanjutnya disebut pelaku utama adalah masyarakat petani, pekebun, peternak, beserta keluarga intinya.
9. Pelaku Usaha adalah perorangan warga Indonesia atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha pertanian, perikanan dan kehutanan.
10. Petani adalah perorangan warganegara Indonesia beserta keluarganya atau korporasi yang mengelola usaha dibidang pertanian yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran dan jasa penunjang.
11. Pos Penyuluhan Desa/Kelurahan adalah kelembagaan penyuluhan pada tingkat desa/kelurahan yang merupakan unit kerja nonstruktural yang dibentuk dan dikelola secara partisipatif oleh pelaku utama.
12. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah negara RI sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
13. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
14. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
15. Kelompok tani (POKTAN) adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumberdaya) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.

16. Gabungan Kelompok tani (GAPOKTAN) adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang tergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi.

D. Unsur Program Penyuluhan

1. Keadaan

Keadaan yang menggambarkan fakta-fakta berupa data dan informasi mengenai potensi, produktifitas dan lingkungan usaha pertanian, perilaku/tingkat kemampuan petani dan pelaku dalam usahanya di wilayah (Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, Nasional). Pada saat akan disusunnya program penyuluhan pertanian dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Potensi Usaha menggambarkan peluang usaha dari hulu sampai hilir yang prospektif untuk dikembangkan sesuai dengan peluang pasar, kondisi agro ekosistem setempat, sumberdaya dan teknologi yang tersedia untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan pelaku utama dan pelaku usaha.
- b. Produktifitas usaha menggambarkan perolehan hasil usaha persatuan unit usaha saat ini (faktual maupun potensi perolehan hasil usaha yang dapat dicapai untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan pelaku utama dan pelaku usaha.
- c. Lingkungan usaha menggambarkan kondisi ketersediaan sarana dan prasarana usaha (Agroinput, Pasca panen, Pengolahan distribusi dan pemasaran)serta kebijakan yang mempengaruhi usaha pelaku utama dan pelaku usaha.
- d. Perilaku berupa kemampuan (pengetahuan, keterampilan dan sikap) pelaku utama dan pelaku usaha dalam penerapan teknologi usaha (teknologi usaha hulu, usaha tani dan teknologi usaha hilir).
- e. Kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha menggambarkan keperluan akan perlindungan, kepastian, kepuasan yang dapat menjamin terwujudnya keberhasilan melaksanakan kegiatan usaha pertanian untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan bagi pelaku utama dan pelaku usaha.

2. Tujuan

Tujuan dalam hal ini memuat pernyataan mengenai perubahan perilaku dan kondisi pelaku utama dan pelaku usaha yang dicapai dengan cara menggali dan

mengembangkan potensi yang tersedia pada dirinya keluarga dan lingkungan untuk memecahkan masalah yang dihadapi dan merespon peluang.

Prinsip yang digunakan dalam merumuskan tujuannya itu: SMART: *specific (khas); measurable (dapat diukur); actionary (dapat dikerjakan/dilakukan); Realistic (Realistis); dan Time Frame (Memiliki batasan waktu untuk mencapai tujuan).*

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam merumuskan tujuan adalah: ABCD: *Audience (khalayak sasaran); Behavior (Perubahan perilaku yang dikehendaki); Condition (Kondisi yang akan dicapai); dan Degree (Derajat kondisi yang akan dicapai).*

3. Permasalahan

Permasalahan dalam hal ini terkait dengan faktir-faktor yang dinilai dapat menyebabkan tidak tercapainya tujuan atau faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan antara kondisi saat ini (faktual) dengan kondisi yang ingin dicapai. Faktor-faktor tersebut antara lain:

- a. Faktor yang bersifat perilaku, yaitu faktor yang berkaitan dengan tingkat adopsi pelaku utama dan pelaku usaha terhadap penerapan suatu inovasi/teknologi baru, misalnya belum yakin, belum mau, atau belum mampu menerapkan dalam usahanya.
- b. Faktor yang bersifat non perilaku, yaitu faktor yang berkaitan dengan ketersediaan dan kondisi sarana dan prasarana pendukung usaha pelaku utama dan pelaku usaha, misalnya ketersediaan pupuk benih/bibit atau modal.

Dari sekian banyak permasalahan yang diidentifikasi, perlu dibuat pemeringkatan sesuai dengan prioritas pembangunan pertanian disuatu wilayah, berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

- a. apakah masalah itu menyangkut mayoritas para pelaku utama dan pelaku usaha;
- b. apakah erat kaitannya dengan potensi usaha, produktifitas, lingkungan usaha, perilaku, kebutuhan, efektifitas dan efisiensi pelaku uusaha; dan
- c. apakah tersedia kemudahan biaya, tenaga, teknologi/inovasi untuk pemecahan masalah.

Penetapan urutan prioritas masalah tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan teknik identifikasi faktor penentu (impac point) dan teknik pemeringkatan masalah lainnya.

4. Rencana Kegiatan

Rencana kegiatan menggambarkan apa yang dilakukan untuk mencapai tujuan, bagaimana caranya, siapa yang melakukan, siapa sasarannya, dimana, kapan, berapa biayanya, dan apa hasil yang akan dicapai untuk memecahkan masalah yang dihadapi dan merespon peluang yang ada. Untuk merumuskan rencana kegiatan perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Tingkat kemampuan (pengetahuan, sikap dan keterampilan) pelaku utama dan pelaku usaha;
- b. Ketersediaan teknologi/inovasi, sarana dan prasarana, serta sumberdaya lain yang mendukung kegiatan penyuluhan pertanian;
- c. Tingkat kemampuan (Pengetahuan, Ketersampilan dan Sikap) Penyuluh Pertanian;
- d. Situasi lingkungan fisik sosial dan budaya yang ada; dan
- e. alokasi pembiayaan yang tersedia.

Rencana kegiatan harus memuat unsur-unsur:

SIADIBIBA: siapa yang akan melaksanakan?; Bilamana/kapan waktu pelaksanaan?; Berapa banyak hasil yang ingin dicapai (Kwantitas dan Kualitas)?; Berapa korbanan yang diperlukan (biaya, tenaga, dll)?; serta Bagaimana melaksanakannya (melalui kegiatan apa)?.

Rencana kegiatan yang disajikan dalam bentuk tabulasi/matriks yang berisi masalah, kegiatan, metode, keluaran, sasaran, volume/frekuensi, lokasi, waktu, biaya, sumber biaya, penanggungjawab pelaksanaan dan pihak terkait.

E. Mekanisme Penyusunan Programa Penyuluhan

1. Keterkaitan dan keterpaduan penyusunan programa penyuluhan pertanian dengan Proses Perencanaan Pembangunan.

Penyuluhan pertanian terintegrasi dengan subsistem program pembangunan pertanian. Dengan demikian proses penyusunan programa penyuluhan pertanian dilakukan secara sinergis dan terpadu dengan proses perencanaan pembangunan pertanian.

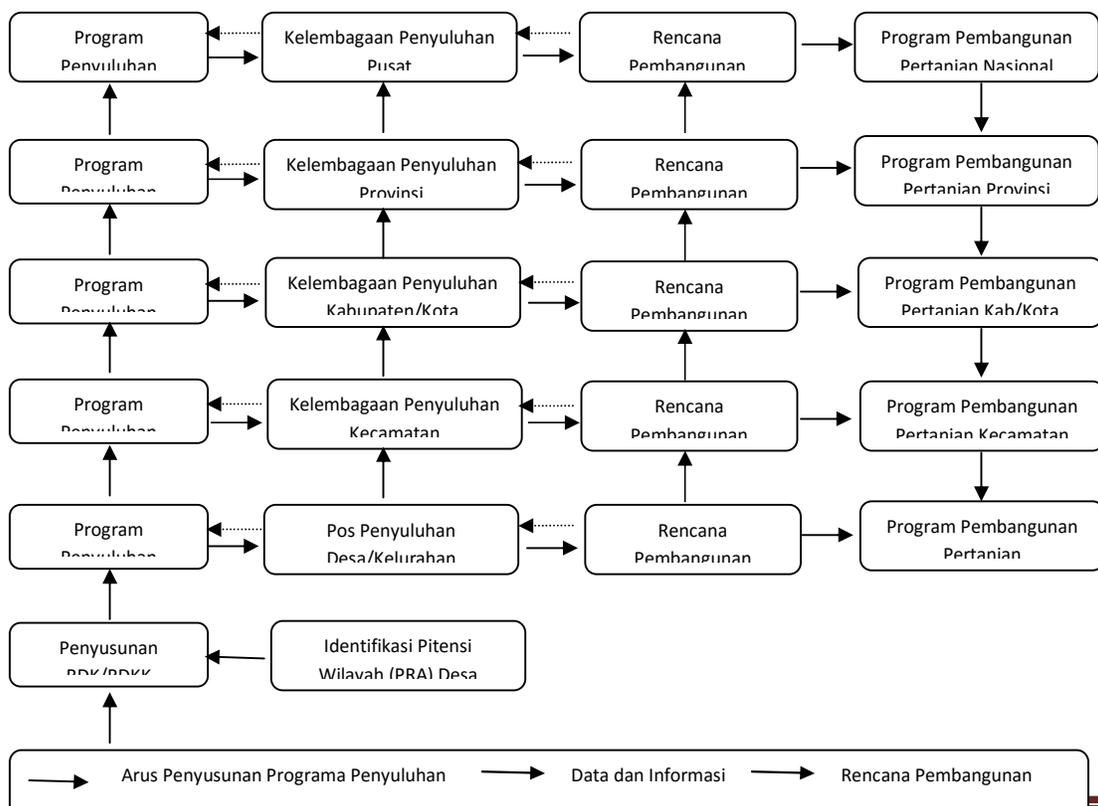
Programa penyuluhan pertanian disusun setiap tahun dan memuat rencana penyuluhan pertanian tahun berikutnya dengan memperhatikan siklus anggaran pada masing-masing tingkatan, serta mencakup pengorganisasian dan pengelolaan sumberdaya sebagai dasar penyelenggaraan penyuluhan pertanian.

Penyusunan program penyuluhan pertanian dilakukan secara partisipatif untuk mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan pelaku utama dan pelaku usaha. Adapun jumlah dan alokasi pembiayaan kegiatan-kegiatan penyuluhan pertanian yang tercantum pada program penyuluhan dipusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan menjadi dasar dalam penyusunan APBD dan APBN.

Kelembagaan penyuluhan dimasing-masing tingkatan memfasilitasi proses penyusunan program penyuluhan pertanian agar program penyuluhan nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan dapat berlangsung seiring sejalan, serta materi kegiatan penyuluhannya saling mendukung.

Keterkaitan program penyuluhan pertanian dengan perencanaan pembangunan dapat dilihat pada bagan berikut ini:

Keterkaitan dan Keterpaduan Penyusunan Program Penyuluhan Dengan Perencanaan Pembangunan



2. Proses Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian

Proses penyusunan programa penyuluhan, terdiri atas kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. Identifikasi program-program pembangunan pertanian dari masing-masing Eselon I lingkup Departemen Pertanian, dinas/instansi lingkup pertanian di provinsi dan kabupaten/kota, serta kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha. Khusus untuk tingkat desa, identifikasi keadaan, masalah dan tujuan digali secara langsung dari pelaku utama dan pelaku usaha di desa melalui metoda/teknik PRA dan atau teknik lainnya.
- b. Sintesa kegiatan penyuluhan pertanian yang ada dalam program pembangunan pertanian menjadi prioritas dari masing-masing Eselon I lingkungan Departemen Pertanian, dinas/instansi lingkup pertanian di provinsi dan kabupaten/kota dengan program kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha untuk menghasilkan draf programa penyuluhan pertanian.
- c. Penetapan keadaan, masalah, tujuan dan cara mencapai tujuan.
- d. Pengesahan programa [penyuluhan dilakukan oleh Kepala Balai Penyuluhan, Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten.Kota, Ketua Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi, atau Kepala Badan Penyuluhan sesuai dengan tingkat administrasi pemerintahan (khusus untuk tingkat desa/kelurahan tidak [erlu disahkan, namun cukup diketahui oleh kepala desa/kelurahan).
- e. Pembubuhan tanda tangan pimpinan pemerintahan dimasing-masing tingkatan dan wakil-wakil Eselon I lingkup Departemen Pertanian , dinas/instansi lingkup pertanian di provinsi dan kabupaten/kota pada lembar pengesahan programa penyuluhan pertanian, agar programa penyuluhan pertanian menjadi bagian dari perencanaan pembangunan.
- f. Penjabaran programa penyuluhan pertanian kedalam rencana kerja tahunan setiap penyuluh pertanian.
- g. Apabila dipandang perlu, dapat dilakukan revisi programa penyuluhan pertanian dan rencana kerja tahunan penyuluh pertanian yang dilakukan setelah keluarnya APBD dan APBN.

3. Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian

a. Tingkat Desa/Kelurahan

- 1) Penyuluh pertanian yang bertugas di desa/kelurahan memfasilitasi proses penyusunan programa penyuluhan pertanian tingkat desa/kelurahan.
- 2) Apabila di satu desa belum ada penyuluh yang ditugaskan, maka penyusunan programa penyuluhan pertanian di desa/kelurahan tersebut difasilitasi oleh penyuluh pertanian yang wilayah kerjanya meliputi desa/kelurahan.
- 3) Penyusunan programa desa/kelurahan dimulai dengan penggalan data dan informasi mengenai potensi desa, monografi desa, jenis komoditas unggulan desa dan tingkat produktivitasnya, keberadaan kelompok tani (GPOKTAN)/Gabungan Kelompok Tani (GPOKTAN), keberadaan kelembagaan agribisnis desa, masalah-masalah yang dihadapi oleh pelaku utama dan pelaku usaha. Penggalan data dan informasi ini dilakukan bersama-sama dengan tokoh dan anggota masyarakat guna menjangkau kebutuhan nyata, harapan dan aspirasi pelaku utama dan pelaku usaha, antara lain dengan menggunakan metode dan instrumen *Participatory Rural Appraisal* (PRA) atau teknik identifikasi keadaan wilayah lainnya.
- 4) Hasil penggalan data informasi tersebut merupakan masukan untuk menyusun rencana kegiatan poktan/gapoktan dalam setahun yang mencerminkan upaya perbaikan produktivitas usaha di tingkat kelompok tani/gabungan kelompok tani (Rencana Definitif Kelompok/RDK), yang dilengkapi dengan rincian kebutuhan sarana produksi/usaha yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan rencana tersebut (Rencana Definitif Kebutuhan Kelom[ok/RDKK). Hal ini sekaligus dimaksudkan guna memudahkan penyuluh dalam merekapitulasi kebutuhan sarana produksi dan mengupayakan pemenuhannya secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat sasaran, tepat harga.
- 5) Selanjutnya hasil rekapitulasi RDK dan RDKK seluruh poktan/gapoktan di desa akan disintesakan dengan kegiatan-kegiatan dinas instansi lingkup pertanian yang dialokasikan di desa tersebut.
- 6) Sintesa kegiatan POKTAN/GAPOKTAN ditingkat desa dengan kegiatan-kegiatan dinas/instansi lingkup pertanian di desa, sesuai dengan tahapan proses, dilakukan melalui serangkaian pertemuan-pertemuan yang dimotori

oleh para penyuluh pertanian di desa/kelurahan dan dihadiri kepala desa, pengurus kelembagaan pelaku usaha, penyuluh swasta dan penyuluh swadaya yang bertugas di desa.

- 7) Programa Penyuluhan Pertanian Desa/Kelurahan yang sudah final ditandatangani oleh para penyusun (perwakilan pelaku utama dan pelaku usaha serta penyuluh pertanian), kemudian ditandatangani oleh kepala desa/kelurahan, sebagai tanda mengetahui.
- 8) Programa Penyuluhan Pertanian Desa/Kelurahan diharapkan telah selesai disusun paling lambat bulan September tahun berjalan, untuk dilaksanakan pada tahun berikutnya.
- 9) Programa Penyuluhan Pertanian Desa.Kelurahan yang sudah final disampaikan kepada Balai Penyuluh di Kecamatan sebagai bahan penyusunan programa penyuluhan pertanian kecamatan, dan untuk disampaikan dalam Forum Musrenbangdes (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Pembangunan Desa) sebagai bahan penyusunan perencanaan pembangunan desa.

F. Penugasan

1. Mahasiswa datang ke sumber informasi yang berkenaan dengan penyusunan programa penyuluhan pertanian (Dinas tk kecamatan, BPP, Badan Pelaksana penyuluhan pertanian, kantor statistik, kepala desa, pengurus seksi LKMD/BPD, KTNA kecamatan/desa, catatan kelompok tani, catatan penyuluh, dll).
2. Kumpulkan data sekunder mengenai :
 1. potensi desa,
 2. monografi desa,
 3. jenis komoditas unggulan desa dan tingkat produktivitasnya,
 4. keberadaan Kelompok Tani (POKTAN) / Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN)
 5. keberadaan kelembagaan agribisnis desa,
 6. masalah-masalah yang dihadapi oleh pelaku utama dan pelaku usaha.
 7. Kebutuhan sarana produksi (RDK dan RDKK)
 8. Programa Penyuluhan Pertanian tk desa dan Kecamatan.
3. Mahasiswa menyusun kembali salah satu programa penyuluhan pertanian (programa desa atau kecamatan) yang ada.
4. Mahasiswa melaporkan penyusunan programa penyuluhan pertanian kepada dosen pembimbing.

G. Rangkuman

Programa penyuluhan pertanian yaitu rencana tertulis yang disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyuluhan pertanian.

Programa penyuluhan terdiri atas program penyuluhan desa/kelurahan, atau unit kerja lapangan, program penyuluhan kecamatan, program penyuluhan kabupaten/kota, program penyuluhan provinsi, dan program penyuluhan nasional. Program penyuluhan pertanian terdiri dari empat unsur yang saling berkaitan dan tersusun menurut urutan yang tidak boleh diubah. Ke empat unsur tersebut adalah keadaan, tujuan, permasalahan dan rencana kegiatan (Anonim, 2009).

H. Penutup

1. Kesimpulan

Setelah konsep program disahkan menjadi program penyuluhan pertanian, selanjutnya dijabarkan kedalam Rencana Kerja Tahunan Penyuluh (RKTP). Program Penyuluhan Pertanian disusun untuk memberikan arah dan pedoman sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyuluhan pertanian

2. Tindak Lanjut

Setelah menerapkan pengetahuan ini dalam kegiatan pembelajaran, pasti akan menemui banyak kendala, dan permasalahan-permasalahan baru di lapangan. Untuk itu mahasiswa harus selalu mengembangkan diri, untuk selalu belajar, mengadakan inovasi, belajar penyusunan program penyuluhan pertanian.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim .2009. *Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 25/Permentan/OT.140/5/2009 Tanggal: 13 Mei 2009 tentang Pedoman Penyusunan Program Penyuluhan Pertanian.*
- Anonim. 2006. *Undang-Undang. Sistem Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan.* Jakarta: Departemen Pertanian.
- Anonim. 2007. *Permentan Nomor 273/KPTS/OT.160/4/2007 tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani*
- Anonim. 2010. *Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: KEP . 29/ MEN/III/ 2010 tentang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Pertanian Bidang Penyuluhan Pertanian.*
- Mardikanto. T, 2009. *Sistem Penyuluhan Pertanian.* Surakarta: Sebelas Maret University Press..

UNIT 4
RENCANA KERJA TAHUNAN PENYULUH

Disusun Oleh:

Ir. Fahrudin Nasution, M.P.

A. Tugas Pokok dan Fungsi penyuluh

Tugas pokok penyuluh pertanian adalah melakukan kegiatan persiapan penyuluhan pertanian, pelaksanaan penyuluhan pertanian, evaluasi dan pelaporan, serta pengembangan penyuluhan pertanian.

Fungsi Sistem penyuluhan

1. Memfasilitasi proses pembelajaran pelaku utama dan pelaku usaha.
2. Mengupayakan kemudahan akses pelaku utama dan pelaku usaha kesumber informasi, teknologi, dan sumberdaya lainnya agar mereka dapat mengembangkan usahanya.
3. Meningkatkan kemampuan kepemimpinan, manajerial, dan kewirausahaan pelaku utama dan pelaku usaha.
4. Membantu pelaku utama dan pelaku usaha dalam menumbuh kembangkan organisasinya menjadi organisasi ekonomi yang berdaya saing tinggi, produktif, menerapkan tatakelola berusaha yang baik, dan berkelanjutan.
5. Mampu menganalisis dan memecahkan masalah serta merespon peluang dan tantangan yang dihadapi pelaku utama dan pelaku usaha dalam mengelola usahanya.
6. Menumbuhkan kesadaran pelekut utama dan pelaku usaha terhadap kelestarian fungsi lingkungan.
7. Melembagakan nilai-nilai budaya pembangunan pertanian, perikanan, dan kehutanan yang maju dan modern bagi pelaku utama secara berkelanjutan.

B. Unsur-unsur dalam Rencana Kerja Tahunan Penyuluh

Rencana Kerja Tahunan Penyuluh (RKTP) merupakan rencana kegiatan penyuluh dalam kurun waktu setahun yang dijabarkan dari programa penyuluhan di pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, atau desa/kelurahan. RKTP juga merupakan pernyataan tertulis dari serangkaian kegiatan yang terukur, terealistis, bermamfaat dan dapat dilaksanakan oleh seorang penyuluh di wilayah kerja masing-masing pada tahun yang berjalan. Rencana kerja tahunan penyuluh tersebut dituangkan dalam bentuk matriks yang berisi tujuan, masalah,

sasaran, kegiatan/metode, materi, volume, lokasi, waktu, sumber biaya, pelaksana dan penanggung jawab seperti tercantum pada Form 1.

C. Penetapan Rencana Kegiatan

Ada dua jenis rencana yang harus disusun penyuluh yaitu :

1. Rencana kegiatan penyuluhan berupa masalah-masalah yang bersifat perilaku, yang antara lain bisa disidik (identifikasi) berdasarkan teknik faktor tertentu, biasanya yang berhubungan langsung dengan usahatani, contoh :
 - a. Menggunakan benih berlabel;
 - b. Mengolah tanah;
 - c. Penggunaan sistem tanam;
 - d. Cara dan waktu menyang;
 - e. Cara, waktu dan dosis pemupukan;
 - f. Penggunaan air pengairan;
 - g. Pengendalian hama dan penyakit;
 - h. Penggunaan teknologi pasca panen;
 - i. Bertani model PHT;
 - j. Bertani model PTT.

2. Rencana kegiatan untuk membantu mengikhtarkan pelayanan dan pengaturan, berupa masalah-masalah petani yang bersifat non perilaku. Antara lain masalah-masalah yang berkaitan dengan kondisi sarana dan prasarana usahatani, pembiayaan, pengaturan, pelayanan, dan kebijakan pemerintah/iklim usaha yang kurang kondusif. Kegiatan ini biasanya tidak langsung berhubungan dengan usahatani, contoh :
 - a. Membuat jalan-jalan usahatani secara gotong royong.
 - b. Gotong royong memperbaiki tali air.
 - c. Pemanfaatan jasa Ulu-Ulu (orang yang mengatur air).
 - d. Memfasilitasi pinjaman modal.
 - e. Memfasilitasi rapat RDK/RDCK di Balai Desa.
 - f. Rapat penggunaan benih berlabel di Balai Desa.
 - g. Pengaturan pembagian pupuk.
 - h. Menyampaikan kebijakan pemerintah.
 - i. Rapat penetapan mulai tanam.
 - j. Penyampaian penentuan harga padi oleh pemerintah.

D. Langkah Kerja Menyusun RKTP

1. Tentukan tujuan-tujuan yang akan dicapai dan masalah-masalah yang akan diselesaikan pada tahun bersangkutan dan melalui sasaran mana yang paling tepat (amati program dan matriks program penyuluhan pertanian). Isikan pada RKTP Form 1.
2. Tetapkan materi-materi kegiatan atau metode-metode yang akan digunakan untuk mencapai tujuan, satu tujuan mungkin diperlukan beberapa materi.
3. Tentukan jumlah biaya yang diperlukan untuk melaksanakan satu persatu kegiatan, dari kegiatan yang akan dilaksanakan jangan melebihi anggaran yang telah ditetapkan.
4. Untuk mencapai tujuan jangan lupa kegiatan mengikhtikarkan kemudahan, menuliskan alat/bahan yang digunakan, amati kembali RKTP yang saudara susun.
5. Isi kolom volume, lokasi, waktu, sumber biaya, penanggung jawab, pelaksana, dan keterangan sesuai penjelasan matriks rencana kerja tahunan penyuluh.

E. Rangkuman

Rencana Kerja Tahunan Penyuluh (RKTP) adalah sebagian dari tugas pokok dan fungsi sistem penyuluhan pertanian. RKTP merupakan pernyataan tertulis dari serangkaian kegiatan yang terukur, terealistis, bermanfaat dan dapat dilaksanakan oleh seorang penyuluh di wilayah kerja masing-masing pada tahun yang berjalan. RKTP disusun dalam satu Desa yang terdiri dari jadwal kegiatan, jenis kegiatan yang didasarkan pada tugas pokok dan program setempat, indikator kinerja dari setiap kegiatan, dan hal-hal atau bahan-bahan yang perlu dipersiapkan dalam rangka memfasilitasi pelaku utama dan pelaku usaha.

F. Penugasan

1. Mengumpulkan data rencana kerja tahunan penyuluh (RKTP), RKTP dapat diambil dari salah seorang penyuluh senior yang bisa menjadi contoh bagi mahasiswa dalam menyusun RKTP yang terukur, terealistis, bermanfaat dan dapat dilaksanakan oleh seorang penyuluh
2. Lakukan wawancara tentang cara penyusunan RKTP.
3. Susunlah sebuah RKTP berdasarkan data program yang telah disusun pada Unit 3.
4. Menyusun jadwal kegiatan yang sesuai dengan RKTP yang disusun untuk selama satu tahun dalam wilayah satu Desa

G. Penutup

Rencana kerja tahunan penyuluh ini merupakan acuan bagi mahasiswa PKL I semester II jurusan penyuluhan perkebunan dan jurusan penyuluhan pertanian STPP Medan. Dengan adanya acuan ini, diharapkan setiap mahasiswa mempunyai persepsi yang sama terhadap RKTP dan dapat menyusunnya tepat waktu dalam wilayah satu Desa.

DAFTAR PUSTAKA

Permenpan, 2008. Tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kriditnya. Nomor : PER/02/MENPAN/2/2008. Jakarta.

Permentan, 2009. Pedoman Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian. Nomor : 25/Permentan/OT.140/5/2009. Jakarta.

UU RI, 2006. Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan. Nomor 16. Jakarta.

RENCANA KERJA TAHUNAN PENYULUH (RKTP)

Nama :

Tahun :

Wilayah Kerja :

No	Tujuan	Masalah	Sasaran	KEGIATAN PENYULUHAN								Ket
				Materi	Keg/Metoda	Vol	Lokasi	Wkt	Sumber Biaya	Penanggung Jwb	Pelaksana	

Ket :

Disahkan oleh Kepala BPP, Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Kab/Kota,

Ketua Bakor Penyuluhan Provinsi atau Badan Pelaksana sesuai tingkat administrasi pemerintahan.

Penjelasan Matriks Rencana Kerja Tahunan Penyuluh

A. Tujuan

Kolom ini berisi uraian singkat mengenai upaya yang akan ditempuh untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumberdaya pembangunan pertanian secara umum, khususnya yang berkaitan dengan perubahan pengetahuan, wawasan, sikap dan perilaku pelaku utama dan pelaku usaha serta seluruh pemangku kepentingan dalam peningkatan produktivitas usaha pertanian di suatu wilayah.

B. Masalah

Kolom ini berisi uraian singkat mengenai faktor-faktor yang menyebabkan belum tercapainya tujuan pembangunan pertanian yang diharapkan, baik yang bersifat perilaku maupun non perilaku, yang dihadapi oleh pelaku utama dan pelaku usaha serta seluruh pemangku kepentingan dalam peningkatan produktivitas usaha pertanian di suatu wilayah.

C. Sasaran

Kolom ini menjelaskan mengenai siapa yang direncanakan untuk mendapat manfaat dari penyelenggaraan suatu kegiatan/metode penyuluhan pertanian ditingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, atau desa/kelurahan, yaitu :

1. Pelaku usaha, pelaku utama dan kelembagaan petani (untuk program penyuluhan di semua tingkatan).
2. Penyuluh dan petugas dinas/instansi lingkup pertanian yang bertugas setingkat dibawah wilayahnya, serta pemangku kepentingan lainnya. (untuk program penyuluhan di tingkat kabupaten/kota, provinsi dan nasional).

Penetapan sasaran perlu dilakukan berdasarkan hasil analisis gender yang dilakukan terhadap pelaku utama dan pelaku usaha pertanian di tingkat rumah tangga petani dan masyarakat pedesaan pada umumnya, khususnya untuk menentukan “siapa melakukan apa?” dan “siapa memutuskan apa?”. Dengan demikian, sasaran penyelenggaraan suatu kegiatan/metode penyuluhan akan lebih spesifik karena diarahkan langsung kepada petani dengan penjelasan laki-laki, perempuan atau keduanya yang berdasarkan hasil analisis gender merupakan pelaku kegiatan tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari bias gender dan distorsi pesan akibat penyamarataan sasaran yang dilakukan tanpa mempertimbangkan peran masing-masing (laki-laki atau perempuan) dalam kegiatan usaha, maupun dalam pengambilan keputusan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan usahanya.

D. Materi

Kolom ini berisi mengenai jenis informasi teknologi yang menjadi pesan bagi sasaran baik dalam bentuk pedoman-pedoman, petunjuk teknis suatu komoditas tertentu dan lain-lain.

E. Kegiatan/Metode

Kolom ini berisi kegiatan-kegiatan atau metode penyuluhan yang dapat memecahkan masalah untuk mencapai tujuan.

F. Volume

Kolom volume berisi mengenai jumlah dan frekuensi kegiatan yang akan dilakukan agar sasaran dapat memahami dan melaksanakan pesan yang disampaikan melalui kegiatan/metode penyuluhan, atau agar terjadinya perubahan perilaku pada sasaran.

G. Lokasi

Kolom ini memuat mengenai lokasi kegiatan penyuluhan yang akan dilaksanakan (desa, kecamatan, kabupaten dll).

H. Waktu

Kolom ini berisikan mengenai waktu pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam program penyuluhan.

I. Sumber Biaya

Kolom sumber biaya diisi mengenai berapa biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan yang telah ditetapkan, serta dari mana sumber biaya yang tersebut diperoleh.

J. Penanggung Jawab

Kolom ini berisi mengenai siapa penanggung jawab pelaksanaan kegiatan penyuluhan, sehingga apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dapat dengan jelas dimintai pertanggung jawaban.

K. Pelaksana

Kolom ini berisi mengenai siapa melaksanakan kegiatan-kegiatan penyuluhan tersebut, apakah dilakukan oleh penyuluh, petani/kontaktan dan/atau pelaku usaha.

L. Keterangan

Kolom ini berisi uraian mengenai hal-hal yang perlu dijelaskan tentang pihak-pihak yang diharapkan terlibat dalam pelaksanaan kegiatan.

